

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SANITASI PONDOK PESANTREN (SANITREN) SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN BUPATI TANGERANG TAHUN 2019–2024

Hanif Azhar¹, Bambang Mardi Sentosa², Dafyar Eliadi H³
Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Pondok Pesantren (Sanitren) sebagai Program Unggulan Bupati Tangerang Tahun 2019–2024” yang dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sarana sanitasi di pondok pesantren salafi dan pengembangan salafi di Kabupaten Tangerang sehingga berdampak pada kesehatan santri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan program Sanitren, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan informan utama dari pejabat pemerintah daerah, fasilitator program, serta pimpinan pesantren penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan program telah jelas, implementasi masih menghadapi kendala berupa fluktuasi capaian tahunan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta koordinasi antar organisasi yang belum optimal. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, dan partisipasi pesantren, sedangkan faktor penghambat meliputi keterlambatan anggaran, keterbatasan tenaga teknis, serta resistensi sosial budaya. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan komunikasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan strategi partisipatif berbasis budaya pesantren agar program dapat berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sanitasi, Pesantren, Sanitren, Kabupaten Tangerang.

Abstract

*This research is titled "Implementation of the Islamic Boarding School Sanitation (Sanitren) Program Policy as a Flagship Program of the Regent of Tangerang (2019–2024)." It is motivated by the limited sanitation facilities in *Salafi* Islamic boarding schools (*pesantren*) in Tangerang Regency, which impacts the health of the students (*santri*). The study aims to analyze the implementation of the Sanitren program policy, identify supporting and inhibiting factors, and formulate policy recommendations to enhance the program's effectiveness and sustainability. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed, utilizing the Van Meter and Van Horn policy implementation model. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and document analysis, involving key informants such as local*

*government officials, program facilitators, and the leadership of beneficiary *pesantren*. The results indicate that while the program's objectives are clear, implementation faces challenges – including fluctuating annual achievements, limited human and financial resources, and suboptimal inter-organizational coordination. Supporting factors include local government commitment, regulatory support, and *pesantren* participation, whereas inhibiting factors include budget delays, a shortage of technical personnel, and socio-cultural resistance. Recommendations include strengthening stakeholder communication, enhancing human resource capacity, and implementing participatory strategies grounded in *pesantren* culture to ensure program sustainability.*

Keywords: Policy Implementation, Sanitation, Islamic Boarding School (Pesantren), Sanitren, Tangerang Regency.

A. Pendahuluan

Pembangunan sektor kesehatan dan lingkungan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk di lingkungan pondok pesantren . Sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menampung ribuan santri, pondok pesantren memiliki kebutuhan besar terhadap infrastruktur dasar, khususnya sarana sanitasi yang layak, higienis, dan ramah lingkungan (Bappenas, 2020). Di Kabupaten Tangerang, ratusan pondok pesantren salafi dan salafi pengembangan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal sanitasi, mulai dari ketiadaan jamban sehat, sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai, hingga minimnya kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Ketimpangan akses terhadap sanitasi yang layak di lingkungan pondok pesantren tidak hanya menjadi persoalan teknis infrastruktur, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam kebijakan pembangunan yang inklusif. Sebagian besar pondok pesantren salafi dan pengembangan salafi berdiri secara mandiri tanpa sokongan pendanaan besar dari pemerintah, sehingga kerap luput dari program-program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas pengelolaan internal pesantren, baik dari aspek manajemen maupun sumber daya manusia, turut memperbesar tantangan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana sanitasi secara berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan partisipatif dan kultural yang sesuai dengan karakteristik komunitas pesantren.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan Program Sanitasi Pondok Pesantren (Sanitren) sebagai salah satu inovasi daerah yang strategis. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan pesantren melalui pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berkelanjutan. Komitmen terhadap program ini tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD 2019–2023, serta diperkuat melalui Peraturan Bupati Tangerang No. 49 Tahun 2020 dan Perbup No. 30 Tahun 2022 yang menegaskan Sanitren sebagai program prioritas daerah (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2020, 2022a). Namun, implementasi kebijakan program Sanitren dari tahun ke tahun menunjukkan ketidakkonsistenan capaian, baik dari sisi jumlah pesantren sasaran maupun keberlanjutan program. Target awal mencakup pembangunan sanitasi di 600 pondok pesantren hingga tahun 2023, namun

realisasi faktual mengalami fluktuasi (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022a). Data dari Peraturan Bupati Tangerang menunjukkan bahwa pada tahun 2019, realisasi bantuan sanitasi mencapai 150 pondok pesantren, sementara pada tahun 2020 tidak ada realisasi sama sekali, lalu dilanjutkan dengan 150 pesantren di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 sebanyak 205 pesantren dan 2023 sebanyak 148 pesantren dan hingga akhir tahun 2024 adalah 792 pesantren, fluktuasi dalam capaian tahunan ini menjadi indikator penting untuk diteliti, khususnya terkait faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi di lapangan (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022a). Ketimpangan capaian ini membuka ruang untuk menganalisis sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, koordinasi antar-OPD, serta partisipasi pondok pesantren terlibat secara optimal dalam implementasi kebijakan ini sebagai penerima manfaat.

David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan sebagai “the authoritative allocation of values for the society”, yang berarti bahwa kebijakan adalah bentuk distribusi nilai-nilai yang dilakukan oleh otoritas yang sah, termasuk di dalamnya pemerintah, perusahaan, atau institusi lainnya. Dengan demikian, kebijakan menjadi alat penting dalam mengatur tindakan kolektif dan mencapai konsensus sosial (Easton, 1965). Kebijakan juga mencerminkan pilihan strategis dalam menghadapi berbagai alternatif solusi. William N. Dunn (2003) menegaskan bahwa kebijakan merupakan seperangkat pilihan tindakan yang saling berkaitan, dibuat oleh aktor atau sekelompok aktor dalam upaya menyelesaikan masalah publik. Pendekatan ini menekankan rasionalitas dan proses berpikir sistematis dalam perumusan kebijakan (Dunn, 2003). Dalam konteks pemerintahan, kebijakan mengarah pada kebijakan publik, yaitu kebijakan yang dibuat oleh dan untuk kepentingan masyarakat luas. Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do”, menekankan bahwa tidak hanya tindakan, tetapi juga yang tidak dilakukan pemerintah memiliki konsekuensi kebijakan (Dye, 1978). Dalam penelitian ini, kebijakan yang dibahas merujuk secara khusus pada kebijakan publik, yakni kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta sejauh mana faktor-faktor lokal mempengaruhi keberhasilannya.

Implementasi tidak hanya sekadar pelaksanaan teknis, tetapi juga menyangkut interpretasi kebijakan, penyesuaian terhadap kondisi lapangan, dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai hasil yang diharapkan (Subarsono, 2011). Dengan demikian, implementasi menjadi proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok administratif dan politik yang diarahkan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, di antaranya: a). Komunikasi Kebijakan: Informasi yang tidak disampaikan secara jelas kepada pelaksana akan menimbulkan kesalahan interpretasi yang berdampak pada hasil

implementasi (Edward III, 1980); b). Sumber Daya: Implementasi memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, SDM, maupun sarana-prasarana. Tanpa hal ini, pelaksanaan di lapangan akan menemui banyak hambatan (Grindle, 1980); c). Sikap dan Komitmen Pelaksana: Jika pelaksana tidak memiliki komitmen terhadap tujuan kebijakan, maka pelaksanaan tidak akan berjalan optimal (Van Meter & Van Horn, 1975a); d). Kondisi Sosial dan Politik: Faktor eksternal seperti dukungan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kestabilan politik juga berperan besar dalam menunjang atau menghambat proses implementasi.

Program Sanitren (Sanitasi Berbasis Pesantren) merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup santri melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak di lingkungan pondok pesantren. Sasaran program ini adalah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang yang memiliki keterbatasan sarana sanitasi, terutama dalam hal toilet, pengelolaan limbah, dan ketersediaan air bersih. Program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan religius, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (United Nations, 2015). Implementasi Kebijakan Program Sanitren didukung oleh berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain: a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang kesehatan dan sanitasi (Sekretariat Negara, 2014); b). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2014 tentang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), yang menjadi kerangka strategis nasional dalam pembangunan sanitasi (Kemenkes RI, 2022); c). RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023, yang secara eksplisit mencantumkan Program Sanitren sebagai program unggulan Bupati Tangerang dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2019). Dengan adanya regulasi tersebut, program Sanitren mendapatkan legitimasi formal dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah berbasis pendekatan partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Program Sanitren juga merepresentasikan pendekatan inovatif dalam kebijakan publik daerah yang melibatkan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya komunitas pesantren (Winarno, 2014). Namun demikian, pesantren salafi dan pengembangan salafi yang dikenal memiliki sistem manajemen yang lebih independen dan cenderung tertutup terhadap intervensi dari luar, menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan program ini. Di sisi lain, permasalahan sanitasi yang belum tertangani secara optimal berdampak langsung pada kesehatan lingkungan dan potensi munculnya penyakit berbasis air seperti diare, infeksi saluran pernapasan, serta penyakit kulit (UNICEF, 2021). Oleh karena itu, program seperti Sanitren menjadi sangat penting untuk memastikan hak atas lingkungan sehat dapat diakses oleh seluruh warga pesantren. Dengan mempertimbangkan urgensi sanitasi yang layak bagi pesantren dan peran strategis program Sanitren dalam pembangunan daerah, maka penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan

program Sanitren secara menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, khususnya dalam konteks pondok pesantren salafi dan pengembangan salafi di Kabupaten Tangerang.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan program Sanitasi Pondok Pesantren sebagai Program Unggulan Bupati Tangerang tahun 2019 - 2024?
2. Bagaimana implementasi program Sanitasi Pondok Pesantren menurut Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn?
3. Apa saja penghambat dan pendorong pelaksanaan program sanitasi pondok pesantren (SANITREN)?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Pondok Pesantren (SANITREN) sebagai Program Unggulan Bupati Tangerang 2019 - 2024. Dengan informan yang diwawancari sebanyak 5 orang informan. Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selama 7 (tujuh) bulan, dari bulan Februari sd Agustus 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Kebijakan Program Sanitasi Pondok Pesantren sebagai Program Unggulan Bupati Tangerang Tahun 2019–2024

Program Sanitasi Pondok Pesantren (SANITREN) ditetapkan sebagai salah satu program unggulan Bupati Tangerang pada periode 2019–2024. Program ini berorientasi pada peningkatan sarana sanitasi di pondok pesantren melalui pembangunan, perbaikan, dan fasilitasi sarana dasar kesehatan lingkungan. Dalam rangka mengevaluasi kebijakan ini, wawancara telah dilakukan dengan berbagai informan yang mewakili unsur teknis pemerintah daerah, lembaga perencana pembangunan, fasilitator lapangan, serta pimpinan pondok pesantren sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Agus Supriyadi dari Bappeda Kabupaten Tangerang menegaskan penggunaan sumber daya harus disesuaikan dengan skala prioritas, sehingga efisiensi program sangat bergantung pada strategi alokasi. Terbatasnya dana mengharuskan pemerintah daerah menetapkan pilihan yang mungkin belum menjawab seluruh kebutuhan pesantren. Kecukupan merujuk pada sejauh mana kebijakan SANITREN mampu menjawab persoalan sanitasi pesantren secara memadai. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan kecukupan program sering kali belum memenuhi kebutuhan riil. Seperti dijelaskan Muh. Sutoni, pemerintah daerah harus melakukan seleksi prioritas, yang berdampak pada terbatasnya fasilitas yang dibangun.

Pimpinan pesantren juga mengonfirmasi adanya gap antara standar program dan kebutuhan sebenarnya. Kyai Kandi menegaskan bahwa kuota fasilitas yang

disediakan tidak sebanding dengan jumlah santri yang ada, sehingga pesantren harus mencari dana tambahan. Hal yang sama ditekankan oleh Kyai Mumuh, yang menyebutkan kebutuhan septic tank berkapasitas besar tidak dapat dipenuhi oleh standar program.

Efektivitas Program Sanitasi Pondok Pesantren (SANITREN) cukup tinggi dari sisi pelaksanaan, terutama karena adanya dukungan politik Bupati Tangerang sebagai penggagas program unggulan. Informan dari Bappeda menegaskan bahwa legitimasi politik Bupati menjadi pendorong utama realisasi program. Hal ini selaras dengan pendapat Subarsono (2011), bahwa legitimasi politik dan dukungan pemimpin daerah merupakan faktor krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan publik. (Subarsono, 2011)

Dukungan politik tersebut juga dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023, yang menempatkan peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan pesantren sebagai bagian dari agenda prioritas. Selain itu, pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Tangerang No. 49 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program unggulan serta Perbup No. 30 Tahun 2022 yang memperkuat pengaturan teknisnya. Hal ini menunjukkan bahwa SANITREN tidak hanya berlandaskan komitmen politik, tetapi juga tertanam dalam arah kebijakan resmi daerah. (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2020, 2022b, 2022a)

2. Implementasi Program Sanitasi Pondok Pesantren Menurut Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn

Analisis implementasi Program SANITREN menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan enam dimensi utama. Model ini memandang implementasi sebagai proses di mana kebijakan diubah menjadi aksi, dipengaruhi oleh interaksi variabel-variabel tersebut. (Van Meter & Van Horn, 1975b). Berdasarkan wawancara dengan Tim Teknis, program SANITREN dipahami sebagai program yang bertujuan meningkatkan sarana sanitasi di pesantren. Muh. Sutoni, yang menjabat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, menyampaikan bahwa secara umum tujuan program telah dipahami oleh Tim Teknis dan fasilitator, meskipun terdapat perbedaan dalam menafsirkan detail teknis pelaksanaannya dalam meningkatkan sarana sanitasi di pesantren. Tim Teknis dan fasilitator umumnya paham, tapi kadang ada perbedaan dalam menafsirkan detail teknisnya. Hal serupa disampaikan oleh Agus Supriyadi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Ia menekankan bahwa tujuan utama program dipahami dengan baik, meskipun interpretasi di lapangan dapat berbeda-beda tergantung pengalaman masing-masing fasilitator. Pimpinan Pondok Pesantren Al Buntet, menjelaskan bahwa kebutuhan fisik pesantren, seperti fasilitas MCK, kadang tidak sepenuhnya tercakup oleh kuota atau ukuran standar yang ditetapkan program. Hal ini menyebabkan pesantren harus menambah dana sendiri untuk memenuhi kebutuhan jumlah fasilitas yang memadai bagi santri. Motivasi pelaksana Program SANITREN yang berbasis manfaat sosial dan tanggung jawab moral memperkuat kemauan untuk melaksanakan program.

3. Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Program Sanitasi Pondok Pesantren (SANITREN)

Faktor penghambat dan pendorong didasarkan pada kesenjangan antara fakta implementasi di lapangan dan dimensi model Van Meter dan Van Horn ini mengungkap dinamika yang memengaruhi keberhasilan program. Masalah anggaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan SANITREN. Jumlah fasilitator yang terbatas menjadi kendala tersendiri, khususnya ketika wilayah cakupan cukup luas. Hal serupa ditegaskan oleh Agus Supriyadi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Perbedaan antara kebutuhan nyata di pesantren dengan standar yang telah ditetapkan program menjadi tantangan yang berulang. Dari berbagai wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan SANITREN berada di persimpangan antara dorongan kuat dari pimpinan pesantren, santri, dan masyarakat, dengan hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Faktor pendorong terutama muncul dari rasa tanggung jawab moral, dukungan komunitas, serta kepemimpinan lokal yang aktif. Sementara itu, faktor penghambat terkait erat dengan keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun personel, serta rigiditas standar program yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata

D. Kesimpulan

Apabila dianalisis melalui ukuran kebijakan publik (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), maka dapat disimpulkan: a). Efektivitas: Program terlaksana dengan dukungan politik yang kuat, namun efektivitas di lapangan belum optimal karena standar yang seragam tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan beragam pesantren. b). Efisiensi: Anggaran yang terbatas memaksa pemerintah membuat prioritas. Efisiensi relatif tercapai, tetapi dengan konsekuensi adanya kebutuhan pesantren yang tidak terpenuhi. c). Kecukupan: Fasilitas yang dibangun sering kali tidak memadai, terutama untuk pesantren besar dengan jumlah santri tinggi. d). Pemerataan: Distribusi program berusaha adil, tetapi keterbatasan anggaran membuat sebagian pesantren tidak menerima fasilitas sesuai kebutuhan. e). Responsivitas: Program kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik pesantren, meskipun fasilitator berupaya mencari solusi alternatif. f). Ketepatan: Standar kebijakan kurang tepat untuk menjawab keragaman kebutuhan lapangan, sehingga terdapat gap antara kebijakan dengan realitas. Implementasi kebijakan Program Sanitren dipengaruhi oleh faktor-faktor tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, serta lingkungan sosial, budaya, dan politik dapat diterima. Seluruh dimensi tersebut terbukti memengaruhi keberhasilan maupun hambatan program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Sanitren merupakan inovasi kebijakan daerah yang memiliki dampak positif bagi peningkatan sanitasi pesantren, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh faktor sumber daya, kesesuaian standar kebijakan dengan kebutuhan riil, serta minimnya mekanisme komunikasi partisipatif.

Referensi

Buku

- Ahmad, M. (2020). *Evaluasi implementasi program sanitasi di pesantren di Provinsi Jawa Timur*.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking* (6th ed.). Houghton Mifflin Company.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2024). *Statistik Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024*. Tangerang: BPS.
- Bappeda Kabupaten Tangerang. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023*. Tangerang: Bappeda.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Prioritas Nasional Sanitasi dan Air Bersih*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta: Bappenas.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten. (2022). *Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2022*. <https://dinkes.bantenprov.go.id/pages/ac31573b-2365-4ff0-b39b-68d9945f4c14/buku-profil-kesehatan-prov-banten-tahun-2022>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Prentice-Hall.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Friedrich, C. J. (1940). *Public Policy and the Nature of Administrative Responsibility*. Harvard University Press.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole Jr., L. J. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. HarperCollins.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the Science of Administration*. Institute of Public Administration.
- Henry, N. (1975). *Public administration and public affairs*.
- Hogwood, B. W. ., & Gunn, L. A. . (1984). *Policy analysis for the real world*. Oxford University Press.
- Jones, C. O. ., & Istamto, Ricky. (1991). *Pengantar kebijakan publik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kemkes RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Sanitasi di Lembaga Pendidikan*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Jakarta: Kemenkes Retrieved <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2018>
- Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. In D. Lerner & H. D. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences*. Stanford University Press.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2020). *Peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Sanitasi Pesantren (Sanitren)*. Pemkab Tangerang.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2022a). *Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Sanitren sebagai Program Prioritas Daerah*. Pemkab Tangerang.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2022b). *Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023*.
- Rawls, John. (1999). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Rizman, R. (2022). *Pengaruh beban kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Riau.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management (11th ed.)*. Pearson Education.
- Rosenbloom, D. H. (1983). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. Random House.
- Sekretariat Negara. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi pembangunan*. Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Harper & Brothers.
- UNICEF. (2021). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2020: Five years into the SDGs*. WHO and UNICEF.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* | Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Waldo, D. (1948). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*.
- Widodo, J. (2022). *Analisis kebijakan publik : konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik : disampaikan sebagai bahan bacaan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, tahun 2006*. MNC Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Zeithaml, V. A. ., Parasuraman, A. ., & Berry, L. L. . (1990). *Delivering quality service : balancing customer perceptions and expectations*. Free Press ; Collier Macmillan.

Jurnal

- Abidin, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Pilar 1 Dalam Pengendalian Lingkungan Masyarakat di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 64–71. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i2.7>
- Ammas, S., Hasran, H., Hasran, B., & Fitriani, A. (2023). Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan di Takalar. *Journal of Government Insight*, 3(1), 295–304. <https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.628>
- Ariyanti, A. D., Simanjuntak, J. H., Jafar, M. I., & Nugroho, R. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 964–973. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i4.1048>
- Azzarrah, I. J., & Kurniawan, B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI JAWA TIMUR. *Publika*, 573–586. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p573-586>
- Dani, A. O. R., & Eriyanti, F. (2022). Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5355–5360. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1166>
- Eldinata, F. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Pedesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15662–15679. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13687>
- Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616.
- Fadli, M., Priatna, W. B., & Marithasari, H. (2025). Strategi Komunikasi Organisasi dalam Pengelolaan Program Off-Air “Damai Indonesiaku Festival Ramadhan” tvOne. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 706–716. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i5.9536>
- Farha, M. F. M., Devis, Y., & Alhidayati, A. (2021). Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stop BABS di Puskesmas Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2020. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 1(2), 85–97. <https://doi.org/10.25311/kesmas.Vol1.Iss2.10>
- Irawan, H., Ayu, I. W., Nurwahidah, S., & Darmanto, D. (2024). PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 7(2), 280–286. <https://doi.org/10.58406/jrktl.v7i2.1915>
- Kharismania, F., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 144–159. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.144-159>
- Prasetyo, R. E., & Nurmandi, A. (2017). Kinerja Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH). *JKAP: Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 21(2), 115–130.
- Rohmah, A., Novaria, R., & Indartuti, I. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA: (Studi Pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi*

- Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(05), 47-55.
<https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1150>
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.
- Santoso, S. (2016). DUKUNGAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROGRAM P2KP ATAU PNPM MANDIRI PERKOTAAN. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 8(2), 1-12. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v8i2.2013.pp1-12>
- Sucahyo, I., Puspitarini, R. C., & Wahyuni, V. N. (2023). The Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4485>
- Susanti. (n.d.). Hubungan Kepatuhan Perawat Melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SOP) Cuci Tangan Terhadap Kejadian. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (Jitek)*, 3(1).
- Syakur, R., Susanti, R. S., Hardi, H., & Hasmin, H. (2021). Hubungan Sanitasi Rumah dengan Kejadian ISPA pada Masyarakat Desa Takalar Lama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman (JKMM)*, 3(2), 86. <https://doi.org/10.30872/jkmm.v3i2.7281>
- Trisnaningati, B. L. N. P. A. P. L. (2024). Pengaruh komunikasi dalam manajemen proyek. *SINTESIA: Jurnal Kajian Interdisipliner*, 3(2).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975a). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975b). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wahyudi, R., Febrianti, N., & Juliandari, M. (2019). Kajian Sanitasi Sekolah Dasar Di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Serambi Engineering*, 4(2). <https://doi.org/10.32672/jse.v4i2.1328>
- Zuliana Sari, Sakinah Sakinah, & Mufaro'ah Mufaro'ah. (2024). Membangun Hubungan yang Positif melalui Komunikasi yang Efektif. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(4), 242-253. <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i4.1385>

Internet

- Kemenag. (n.d.). Statistik Banten. Retrieved May 25, 2025, from <https://sikap.kemenag.go.id/statistik/provinsi/36>